



**SUMBER BERITA**

**RABU, 2 OKTOBER 2018**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Kejati Belum Tetapkan Tersangka BK

**BENGKULU, BE** - Dugaan korupsi dana Beban Kerja (BK) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, 2016, hingga kini masih dialami Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Mengenai penetapan tersangka dilakukan, Kajari Bengkulu Emilwan Ridwan SH MH, tidak menetapkan target waktunya. Dia hanya mengatakan jika kasus tersebut tetap berjalan, karena beberapa pekan lalu tim sudah melakukan ekspose.

"Jika berbicara target belum ada, yang pasti perkara tetap berjalan," ujar Kajari belum lama ini kepada BE.

Dugaan korupsi tunjangan dana BK diduga kuat bakal menyeret nama pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Untuk membuktikan hal tersebut tidak cukup dengan bukti hasil audit kerugian negara, tetapi dibutuhkan saksi ahli yang mengetahui tentang mekanisme pemberian tunjangan dana BK. Perhitungan kerugian negara dugaan korupsi tunjangan dana BK sudah selesai. Hanya saja, dokumen hasil audit tersebut belum sampai di Kejari. Terkait nominal kerugian negara tunjangan dana BK hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemungkinan besar tidak jauh dari hasil audit internal Kejari Bengkulu, yakni diangka Rp 1,4 miliar.

"Pada intinya proses hukum tetap berjalan," imbuh Kajari. Diduga pembayaran tunjangan dana BK, 2015 menyalahi aturan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 36. Karena pada tahun 2014, sesuai dengan perwal nomor 12 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, sementara pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta. Jabatan sekretaris dan kepala bidang pada 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta sementara pada 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta sementara pada tahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. Jabatan bendahara dari Rp 3 juta ditahun 2014 menjadi Rp 4,5 juta ditahun 2015. Staf ASN dari Rp 1,5 juta ditahun 2014 menjadi Rp 3,5 juta ditahun 2015 dan honorer dari Rp 1 juta pada 2014 mendapatkan Rp 3 juta pada 2015. Uang yang harus dikembalikan ASN dan honorer adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015 dikalikan dua bulan. Sampai akhir April lalu, total ASN dan honorer yang mengembalikan 80 orang, dengan total uang sekitar Rp 210 juta. Total uang tersebut jelas sangat kurang, karena diduga total tunjangan dana BK yang dibayarkan Rp 1,2 miliar. (167)